

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Akcigit, Ufuk *et al.* 2017. *Connecting to Power: Political Connection, Innovation, and Firm Dynamic*. The National Bureau of Economics Research.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Ikut Mencerdaskan Bangsa.
- Badan Pusat Statistik. Online. www.bps.go.id (diakses pada 4 Februari 2019)
- , 2019. *Jumlah Kabupaten Kota Menurut Provinsi*. www.bps.go.id (diakses pada 15 Mei 2019).
- Besley, T., Montalvo, J., dan Reynal-Querol, M. 2011. *Do educated leaders matter?. The Economic Journal*, 121(554).
- Blinder, A. S. 1981. *Thoughts on the Laffer Curve*. Dalam Meyer, L. H. (Ed.). *The Supply-Side Effects of Economic Policy*, pp.81-92. Boston/The Hague/London: Kluwer & Nijhoff Publishing.
- Budiono. 2002. *Ekonomi Mikro Seri Sinopsis: Pengantar Ilmu Ekonomi (Buku 1)*. Yogyakarta: BPFE.
- Chen, H., Tang, S., Wu, D., & Yang, D. (2015). The Political Dynamics of Corporate Tax Avoidance : The Chinese Experience *, (June 2014).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. *Dana Alokasi Umum*. online. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 4 Februari 2019.
- , 2017. *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*, online. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 4 Februari 2019.
- , 2018. *Pajak Daerah*, online. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 3 Maret 2019.
- Fuad, M. *et al.* 2000. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Garman, C., Stephan H., & Eliza J. W. 2001. *Fiscal Decentralization: A Political Theory with Latin American Cases*. *World Politics*, 53(2): 205-236.
- Gujarati, D. N. & Dawn, C. P. 2009. *Basic Econometrics*. Fifth Edition. Singapura: McGraw Hill.

- Halim, A. 2001. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Kajian PKAPBN*. online. www.kemenkeu.go.id diakses pada 3 Maret 2019.
- . 2015. *Desentralisasi fiskal seutuhnya*, online. www.kemenkeu.go.id diakses pada 3 Maret 2019.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: UPP AMP YKPN Ikut Mencerdaskan Bangsa.
- Kuncoro, H. 2004. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. *Economic journal of Emerging Markets* (Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang). 9(1), 47-63.
- Laffer, A. B. 2004. *The Laffer Curve: Past, Present, and Future*. *Background*, No. 1765, 1-16.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Principles of Economics*, Edisi 6. Ohio, USA: South-Western Cengage Learning.
- Marliyanti, Dwi S. 2014. *Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar*. *Jurnal E-Jurnal EP Unud*, 2 (6): 265-271.
- Mujani, Saiful, William Liddle, dan Kuskridho Ambardhi. 2011. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Ndadari, L. W., & Adi, P. H. (2008). *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. The 2nd National Conference Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), 6 September 2008, Surabaya.
- Oates, W. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. *National Tax Journal*. (XLVI): 237-243.
- Pratiwi, I. S. (2017). The Role of Corporate Political Connections in the Relation of CSR and Tax Avoidance : Evidence from Indonesia, 6(1), 345–358.

- Ragan, C. T. S. & Lipsey, R. G. 2011. *Economics*, 13th Canadian Edition. Toronto: Pearson Canada.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- . *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*
- . *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- . *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- . *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- . *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Saragih & Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan pada Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.
- Simanjuntak. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi, 5(3), 1625–1641.
- Sugiyono, P. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Tahwin, Muhammad. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, Nomor 2.
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development*. 7th Edition. United States: Addison Wesley
- United Nation Development Programme. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*. Online. www.undp.org (diakses pada 15 Mei 2019).
- Universitas Airlangga. 2018. *Pedoman Penulisan Pembimbingan dan Ujian Skripsi*. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- World Bank. 2013. *Decentralization, online*. www.worldbank.org diakses pada 3 Maret 2019.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.